

DILEMA KEAMANAN KOREA SELATAN DALAM MENGHADAPI NUKLIR KOREA UTARA

Atiqah

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: South Korea and North Korea split into two countries on 25 June 1950, split into two sovereign States as a result of World War II which was later justified through the Cold War. South Korea underwent a security dilemma as North Korea began developing its nuclear program. South Korea is at a dilemma. On the one hand this country needs to increase its military physical strength and strengthen military cooperation with its allies to maintain national and regional stability, but on the other hand South Korean policy will provoke similar actions by North Korea. This study aims to explain the dilemma of South Korea's security against North Korea's nuclear development, and further analyzes the actions taken by South Korea to deal with the security dilemma. The results of this study indicate that North Korea's nuclear development becomes a major threat to South Korea. Efforts were made by the South Korean government to balance Korea's strength. With it South Korea is taking steps to strengthen the defense of security by engaging in military cooperation especially with the United States and Japan. For South Korea by strengthening its defense system it can compensate for North Korea's nuclear weapons if there is a war between them.

Abstrak: Korea Selatan dan Korea Utara terpecah menjadi dua negara pada tanggal 25 Juni 1950, terpecah menjadi dua Negara yang berdaulat merupakan akibat dari Perang Dunia II yang kemudian dijustifikasi melalui Perang Dingin. Korea Selatan mengalami dilema keamanan ketika Korea Utara mulai mengembangkan program nuklirnya. Korea Selatan berada pada titik dilematis. Disatu sisi Negara ini perlu meningkatkan kekuatan fisik militernya dan memperkuat kerjasama militer dengan sekutunya untuk memelihara stabilitas nasional dan kawasan, namun disisi lain kebijakan Korea Selatan ini akan memancing tindakan serupa oleh Korea Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dilema keamanan korea selatan menghadapi perkembangan nuklir Korea Utara, selanjutnya juga menganalisa tindakan yang diambil oleh Korea Selatan untuk menghadapi dilemma keamanan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan nuklir Korea Utara menjadi sebuah ancaman besar bagi Korea Selatan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengimbangi kekuatan Korea. Dengan itu Korea Selatan mengambil langkah untuk memperkuat pertahanan keamanan dengan melakukan kerjasama di bidang militer terutama dengan Amerika Serikat dan Jepang. Bagi Korea Selatan dengan memperkuat sistem pertahanannya hal ini dapat mengimbangi kekuatan senjata nuklir Korea Utara apabila suatu waktu terjadi perang antara keduanya.

Kata Kunci: dilema keamanan, Korea Selatan, Korea Utara, nuklir, reunifikasi.

PENDAHULUAN

Korea Selatan merupakan negara yang terletak di semenanjung Korea, memiliki kelebihan yang banyak dan alam yang indah. Ditambah lagi saat ini terjadi *Korean Wave*¹ yang merupakan diplomasi kebudayaan Korea Selatan terhadap dunia. Korea Selatan bisa dibilang sangat sukses dalam menjadikan *Korean Wave* sebagai ujung tombak diplomasi kebudayaan Korea Selatan di berbagai negara.²

Dibalik kesuksesan diplomasi kebudayaan

Korea Selatan, Negara ini menjadi perhatian publik internasional karena konflik politiknya dengan Negara tetangga, Korea Utara. Perang Korea yang terjadi dari tahun 1950-1953 awalnya merupakan konflik perbedaan ideologi serta isu perbatasan yang menjadi isu yang sangat sensitif antara kedua wilayah ini.³

Korea Utara atau *Democratic People's Republic of Korea* adalah suatu negara yang terletak di Asia Timur Laut dan berbatasan langsung dengan *People's Republic of China* di sebelah utara dan *Republic of Korea* atau lebih dikenal dengan Korea Selatan di bagian selatan. Pada masa *Japanese imperialis*, Korea Utara dan Korea Selatan merupakan negara yang

¹ *Korean Wave* adalah sebuah istilah yang merujuk pada popularitas budaya pop Korea di luar negeri yang isinya berupa film, drama televisi, dan musik pop.

² Yang Seung-Yoon dan Mochtar Mas'oed, *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005

³ *Ibid*, hal 5

bersatu bernama Korea, namun setelah penja-jahan Jepang berakhir, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang memenangkan perang melawan Jepang membagi Korea menjadi 2, Utara dan Selatan, dengan 2 ideologi yang berbeda.⁴ Dimana Korea Utara berhaluan pada Uni Soviet yang bersifat komunis menjadi sangat berbeda dengan Korea Selatan yang berhaluan pada Amerika Serikat yang bersifat Liberal.

Korea Utara dan Korea Selatan terpecah menjadi dua negara pada tanggal 25 Juni 1950. Terpecahnya Korea menjadi dua Negara yang berdaulat merupakan akibat dari Perang Dunia II yang pada akhirnya dijustifikasikan melalui Perang Dingin. Kedua Korea merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik Ideologi Liberal Demokratis dan Komunis-Sosialis antara Blok Barat (Amerika) dan Blok Timur (Uni Soviet/Rusia). Kedua belah pihak saling mencari daerah pengaruh (*enclave*) untuk kepentingan strategis masing-masing, yang akhirnya akan mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di Semenanjung Korea.⁵

Program nuklir Korea Utara didominasi oleh pemikiran Kim Il Sung. Menurut Kim Il Sung, Korea Utara tidak perlu lagi tergantung dengan Negara lain untuk melindungi keamanan nasionalnya. Korea Utara percaya tindakan ini akan memberikan keuntungan strategis, simbolis dan teknologi yang dibutuhkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Korea Utara yang kuat dan makmur. Nuklir bagi Korea Utara dapat menjadi alat penting dalam perundingan internasional.⁶

Menyadari keadaan dan perbedaan yang jelas diantara kedua Negara maka dari itu, dibawah pemerintahan Kim Dae Jung (1998 – 2002) dan Roh Moo Hyun (2003 – 2008), Korea Selatan membuat suatu kebijakan yang lebih menekankan pentingnya kebersamaan

antar Negara Korea. Upaya penyatuan tersebut, tertuang didalam sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Sunshine Policy* (kebijakan Kim Dae Jung) dan *Policy Peace and Prosperity* (Kebijakan Roh Moo Hyun). Melalui *Sunshine Policy*, Kim Dae Jung mencoba untuk mengikutsertakan Korea Utara di dalam setiap kerjasama ekonomi. Untuk itu, pemerintahan Kim Dae Jung tidak henti-hentinya berusaha keras untuk lebih menciptakan suasana damai, rukun dan menuju kerjasama antar dua Negara daripada hubungan yang tertekan dengan konflik, hubungan ketidakpercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara dan hubungan persaingan yang menelan biaya politik yang sia-sia.⁷ Akan tetapi, perjalanan *Sunshine Policy* tidak berjalan dengan mudah seperti yang diharapkan, karena masih terhalang beberapa hambatan sehingga kebijakan secara damai yang dibuat oleh Kim Dae Jung juga tidak dapat berjalan sempurna.

Hambatan yang dihadapi dalam proses reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah perbedaan ideologi yang dianut kedua Negara Korea yaitu Korea Selatan yang menganut paham liberal dan Korea Utara yang menganut paham komunisme. Hambatan lainnya yang dihadapi dalam mewujudkan reunifikasi antara kedua Negara adalah masalah senjata pemusnah masal (nuklir, biokimia, dan peluru kendali) yang sedang dikembangkan oleh Korea Utara. Selain itu adanya ancaman kemanusiaan yang dihadapi Korea Utara seperti kelaparan, pembangkangan, dan pengungsian massal yang potensial, serta ancaman militer konvensional dari Korea Selatan dan sekutunya. Hambatan utama untuk mengatasi aneka tantangan yang muncul dari realitas bahwa tidak ada konsensus di antara kedua negara yang bertetangga yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh setiap manuver Pyongyang.⁸

Korea Selatan berada pada titik dilematis. Disatu sisi Negara ini perlu meningkatkan ke-

⁴ *U.S.: N. Korea Boosting Guerrilla War Capabilities*”. FOX News Network, LLC. 2009-06-23. Di akses pada 10 Maret 2017

⁵ Yang Seung-Yoon dan Mochtar Mas’oed, *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005. Hal 4

⁶ Riri Dwiarto, “Kerjasama Keamanan Asia Timur” dalam *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*, Batarto Bandoro (Penyunting), CSIS, Jakarta, 1999-2000, Hal 185

⁷ Yang Seung Yoon dan Mochtar Mas’oed, *Politik Luar Negeri Korea Selatan : Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2002, Hal. 41

⁸ Diakses dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/02/opini/1056776.htm> “Menjawab Tantangan di Semenanjung Korea pada 17 November 2016

kuatan fisik militernya dan memperkuat kerjasama militer dengan sekutunya untuk memelihara stabilitas nasional dan kawasan, namun disisi lain kebijakan Korea Selatan ini akan memancing tindakan serupa oleh Korea Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korea Selatan meningkatkan kekuatan pertahanannya dilakukan untuk memberikan daya gentar terhadap lawannya, karena adanya dilema keamanan di kawasan. Dilema keamanan tersebut bersumber dari kekhawatiran, rasa takut, dan sikap saling curiga antara satu Negara dengan lainnya, yang diperburuk oleh lemahnya regionalisme di kawasan, sehingga mendorong suatu negara untuk memperkuat pertahanan dengan memperlemah pertahanan negara lainnya. Korea Selatan secara konsisten meningkatkan kekuatan militernya. Kekuatan militer non-konvensional yang dikembangkan adalah membangun kemampuan dalam menggelar peperangan senjata pemusnah massal. Sementara pada kekuatan militer konvensional dikembangkan dengan meningkatkan kemampuan angkatan laut dan angkatan udaranya.

Berdasarkan argumen tersebut, pengembangan dan uji coba senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan sumber dilema keamanan di kawasan dikarenakan dampaknya yang menimbulkan kekhawatiran bagi Korea Selatan. Kebijakan Korea Utara dalam mengembangkan dan menguji coba senjata pemusnah massalnya sebagai tindakan provokatif untuk memberikan daya gentar, menjadi sumber dilema keamanan dikarenakan mengundang kekhawatiran Korea Selatan, akan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatannya. Tindakan tersebut mendorong Korea Selatan, melalui aliansi dan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, untuk membangun sistem pertahanan anti-rudal untuk melemahkan potensi kekuatan dari persenjataan rudal balistik dan senjata nuklir Korea Utara.

Tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan tersebut merupakan salah satu bentuk dilema keamanan yang terdapat di Semenanjung Korea, mengingat tindakan tersebut dilakukan untuk memperkuat pertahanannya sendiri di satu

sisi, sekaligus memperlemah potensi dari kekuatan pertahanan lawannya di sisi lain. Secara keseluruhan, upaya yang dijalankan oleh Korea Selatan dengan kekuatan militer non-konvensional merupakan bentuk dan sumber dilema keamanan yang terdapat di kawasan Semenanjung Korea.

Bentuk Dilema Keamanan Korea Selatan

Pengaruh nuklir yang diberikan oleh Korea Utara berdampak pada keinginan Korea Selatan untuk meningkatkan pasukan militer dan meningkatkan keamanan bagi negaranya. Korea Selatan juga telah merespon ancaman dari nuklir Korea Utara, Korea Selatan melakukan dua tindakan, yaitu meminta jaminan payung nuklir dari Amerika Serikat dengan mempererat hubungan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan serta meningkatkan kapabilitas pertahanan konvensional. Namun adanya peningkatan nuklir Korea Utara dari tahun ke tahun memaksa Korea Selatan untuk mulai mengembangkan program misil dan nuklir untuk menghadapi ancaman Korea Utara.

Reformasi militer besar-besaran dilakukan dengan mengembangkan senjata teknologi tinggi hampir dilakukan di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan situasi baru dan dalam rangka menjaga kepentingannya masing-masing. Beberapa negara telah menyesuaikan kebijakan militer, strategi militer dan meningkatkan pertahanan dalam memperbaiki kualitas kekuatan militer. Di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur belum seluruhnya mampu menjamin kondisi kondusif. Beberapa negara berkesempatan menggunakan peningkatan ekonomi untuk memfasilitasi pengembangan militer, dengan alasan kekuatan militer merupakan instrumen untuk mencapai kepentingan nasional serta dapat meningkatkan keamanan yang digunakan pemerintah Korea Selatan untuk melindungi negara dari agresi ataupun subversi Korea Utara.

Inilah yang menjadi dasar bagi Korea Selatan yaitu berupaya membangun pertahanan yang hebat guna mencapai stabilitas keamanan nasional dari tekanan hingga pertikaian dengan negara lain khususnya Korea Utara. Korea

Selatan mengalokasikan 2.6% dari PDB dan 15% dari pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan militer serta mewajibkan seluruh pria untuk mengikuti wajib militer.⁹ Bentuk kewaspadaan Korea Selatan adalah dengan meningkatkan kemampuan militernya, yang juga merupakan bagian dari rencana Reformasi Pertahanan 2020, dimana penggunaannya dapat diarahkan antara lain untuk menghadapi dinamika politik keamanan kawasan termasuk menghadapi manuver Korea Utara.

Pada November 2010 akhirnya Korea Selatan melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat yang disebut dengan latihan militer Hoguk. Latihan perang bersama ini dilakukan di Laut Kuning dan sekitarnya. Latihan militer gabungan ini bertujuan untuk menggertak pihak Korea Utara agar menghentikan pengembangan nuklir mereka. Lokasi latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat itu dilakukan di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan tepatnya di pulau Yeonpyeong dimana menurut Korea Utara kawasan itu masih kawasan Konflik (masih diperebutkan antar dua Korea).¹⁰

Melaksanakan pertemuan segi enam (*six party talks*) yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Rusia yang isinya menerapkan kesepakatan agar Korea Utara mengambil tindakan untuk menuju tujuan akhir, pembuangan fasilitas nuklir dengan imbalan bahwa lima peserta lain akan bersikap responsif dan mau memberikan bantuan kepada Korea Utara. Dalam pertemuan ini, peserta dari Negara-negara lain juga mendukung terhadap upaya denuklirisasi Korea dan normalisasi hubungan Korea Utara dengan Jepang dan Amerika Serikat serta bersama-sama menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Timur Laut.¹¹

Tindakan Korea Selatan Menambah Kekuatan Militer

Pada tahun 1986 Korea Utara memulai

operasi reaktor nuklir berkekuatan 5 Megawatt di Yongbyon, adapun reaktor itu dibuka setelah tujuh tahun konstruksi dengan bantuan Uni Soviet pada saat itu.¹² Merespon ancaman dari nuklir Korea Utara, Korea Selatan melakukan dua tindakan, yaitu meminta jaminan payung nuklir dari Amerika Serikat dengan mempererat hubungan aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan serta meningkatkan kapabilitas pertahanan konvensional. Namun adanya peningkatan nuklir Korea Utara dari tahun ke tahun memaksa Korea Selatan untuk mulai mengembangkan program misil dan nuklir untuk menghadapi ancaman Korea Utara.

Program misil dan nuklir Korea Selatan dimulai sejak tahun 1970an, dimana Korea Selatan pada tahun 1978 lewat *Agency for Defense Development* yang berhasil mengubah jangkauan misil Nike-Hercules menjadi misil balistik dengan jangkauan 150-250 km. Hal itu membuat Amerika Serikat mengeluarkan memorandum yang membatasi jangkauan misil Korea Selatan agar hanya mencapai 180 km pada tahun 1979.¹³

Korea Selatan terus mengembangkan misil balistiknya dengan cara melakukan uji coba Hyon MU NHK-A sejak tahun 1990an. Korea Selatan juga melakukan upaya untuk melepaskan diri dari memorandum yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dengan berniat untuk bergabung dengan *Missile Technology Control Regime* (MTCR) pada tahun 1995. Di era pemerintahan Kim Dae Jung, Korea Selatan mendirikan *Committee for the Promotion of Defense Reform* dan mengeluarkan *Five-Year Defense Reform Plan* sesuai dengan *Basic Defense Policy Report* pada April 1998. Tujuan dari didirikannya komite tersebut adalah guna menciptakan kemampuan angkatan bersenjata yang kuat, memperluas teknologi informasi persenjataan militer, dan membangun angkatan bersenjata yang rasional, efektif, dan ekonomis. Oleh karena itu, untuk melaksanakannya,

⁹ Ibtimes, 27 November 2010, *Korsel Tingkatkan Anggaran Pertahanan*, Diakses dari: <http://id.ibtimes.com/articles/3455/20101127/korsel-tingkatkan-anggaran-pertahanan.htm>, diakses pada 30 mei 2017.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Rizal Sukma, "Dua Korea dan Prospek Perdamaian di Asia Timur", dalam CSIS, Jakarta. 1992-1993.

¹² <http://www.international.kompas.com/Sejarah-pengembangan-dan-Uji-Coba-Senjata-Nuklir-Korea-Utara>. Diakses pada tanggal 18 September 2017

¹³ Farmaritia, A. W. (2010). *Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur*. Hal 71 – 75.

Presiden Korea pada saat itu, Kim Dae Jung, melakukan beberapa hal diantaranya mendukung upaya reformasi organisasi dengan menciptakan system komando nasional di bidang transportasi, biokimia, dan pertahanan nuklir, memfokuskan perhatian pada aplikasi teknologi informasi terkini di sektor pertahanan serta mempercepat akuisisi aset pertahanan yang berkaitan dengan kapabilitas serangan dan kemampuan perang. Hal tersebutlah yang mendasari proyek pengembangan nuklir Korea Selatan sebagai upaya untuk menghindari ancaman nuklir Korea Utara.¹⁴

Selain mengembangkan nuklir, Korea Selatan juga menerapkan beberapa kebijakan terkait upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya. Korea Selatan menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan dua level ancaman nasionalnya, yaitu runtuhnya keseimbangan kekuatan internasional di kawasan Asia Timur dan adanya ancaman dari Korea Utara terhadap keamanan di Negara Korea Selatan.¹⁵

Adapun kebijakan Korea Selatan terkait pertahanan dan keamanan negaranya pada saat ini, tidak hanya mengandung unsur militer, namun juga dengan cara melalui hubungan kerjasama, dan melakukan upaya-upaya perdamaian. Hal ini didasari oleh adanya *security dilemma* dan kepentingan nasional terkait keamanan Korea Selatan sendiri.

Korea Selatan Melakukan Aliansi dengan Amerika Serikat dan Jepang

Korea Selatan dalam menghadapi konflik dengan Korea Utara melakukan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat dan Jepang dengan tujuan mengimbangi kekuatan yang dimiliki Korea Utara. Hal ini terlihat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin negara Korea Selatan ini sendiri.

Masalah keamanan di kawasan Asia Timur bukan hanya menyangkut masalah persaingan Timur dan Barat, masalah itu menyangkut dimensi yang amat kompleks, baik dimensi sosial, politik,

budaya, psikologi, geografi, sejarah, maupun ekonomi. Benih-benih konflik yang ada, baik yang laten maupun yang manifes, terdapat di dalam negeri masing-masing negara maupun antar negara.

Kerjasama yang dilakukan Korea Selatan dengan Amerika Serikat, Selain menempatkan pasukannya di Korea Selatan, Amerika Serikat juga melakukan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan yang dimulai dari akhir Februari hingga April 2012. Latihan militer gabungan ini bertujuan sebagai bentuk latihan pertahanan bagi Korea Selatan. Sekitar 2.000 prajurit AS ditambah 800 personil tambahan dari luar Korea Selatan didatangkan untuk mengikuti latihan rutin tahunan yang diberi kode *Key Resolve*. Jumlah prajurit tambahan dari pasukan Amerika Serikat pada saat mengasumsikan terjadinya perang berskala menyeluruh di Semenanjung Korea, bersekitar 690.000 dari Angkatan Darat, Laut, dan udara.¹⁶

Korea Selatan dan Jepang menetapkan hubungan yang sangat akrab di segala bidang, termasuk politik, ekonomi, budaya dan kemasarakatan. Akan tetapi, hubungan kerjasama di bidang pertahanan itu tidak begitu semarak. Hubungan sejarah bilateral sejak masa kuno tetap sangat sensitif dan juga diharapkan bahwa hubungan kerjasama militer itu nampaknya sangat mempengaruhi situasi Semenanjung Korea. Namun, karena itu juga dianggap perlunya peningkatan kerjasama pertahanan antara Seoul dan Tokyo. Sekarang kedua negara menjalinkan kesepakatan tentang pertukaran pertahanan bilateral yang menangani pelaksanaan pembahasan secara rutin, pertukaran tenaga militer dan pendidikan, serta latihan kerjasama militer, namun belum terjalin perjanjian militer bilateral. Kedua belah pihak sedang memulai pembahasan mengenai fakta perlindungan informasi dan inteligen militer, GSOMIA dan fakta saling mendukung perbekalan perang, ACSA.¹⁷

Peran Amerika Serikat dalam perkembangan perekonomian Korea Selatan cukup besar. Sesudah terjadinya perang dingin Korea

¹⁴ *Ibid*, hal 69-70

¹⁵ Yang, S.-Y, & Mas' oed, M. (2004). *Politik luar negeri Korea Selatan: Penyesuaian diri terhadap masyarakat internasional*. 15 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 19

¹⁶ Defense Cost-Sharing. 2008. *Analysis of the Policy of ROK-U.S.* diakses dari: <http://www.kida.re.kr/eng/pcrm/newsletter/download.asp?newsletter=201>. 7 Juli 2017

¹⁷ *Ibid*

Selatan mulai membangkitkan perekonomiannya dengan mengejar pertumbuhan yang berorientasi ekspor. Lingkungan ekonomi internasional yang selalu berkembang dan berubah menyebabkan Korea Selatan banyak melakukan kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk dengan negara maju seperti Jepang Amerika Serikat, dan beberapa negara maju di kawasan Eropa. Presiden Korea Selatan saat itu, Lee Myung-bak dan mitranya Presiden Barack Obama sepakat mengembangkan hubungan bilateral sebagai aliansi ganda strategis. Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menjalin aliansi keamanan selama beberapa dekade terakhir, akan tetapi kali ini, perjanjian perdagangan bebas-FTA antara Korea-AS yang baru saja disahkan oleh Kongres AS akan memperkokoh aliansi ekonomi yang diharapkan meningkatkan aliansi militer dan politik ke tingkat baru secara keseluruhan.

Korea Selatan Memperkuat Diplomasi dengan Lembaga Internasional

IAEA (*International Atomic Energy Agency*) adalah bagian dari organisasi bawahan PBB yang selalu memberikan laporan secara berkala di *United Nations General-Assembly* (Majelis Umum PBB) dan *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan PBB). Tujuan dari IAEA ini adalah untuk memperluas kontribusi sosial energi atom untuk tujuan damai. Pembentukan IAEA diusulkan oleh Presiden AS Dwight Eisenhower pada tahun 1953 dan disahkan pada 25 Juli 1957, markas IAEA berada di Wina, Austria.¹⁸

Sekretariat IAEA terdiri dari 2100 ahli multi-disiplin dan staf dari 90 negara. Organisasi ini dipimpin oleh Direktur Jenderal dan enam Deputy Direktur jenderal yang membawahi departemen. Badan pengambil keputusannya adalah Dewan Gubernur (*Board of Governors*) yang terdiri dari 35 orang dan *General Convergence* dari seluruh anggota IAEA. Struktur organisasi IAEA di PBB, merupakan “*Specialized Agency*” dari PBB, namun IAEA tidak berada dibawah pengawasan secara langsung oleh PBB¹⁹.

¹⁸ Michael G. Schechter, “Historical Dictionary of Internasional Organizations”. (Maryland: Scarecrow Press, hal. 110)

¹⁹ *Ibid.*

Misi IAEA berpedoman pada kepentingan dan kebutuhan negara-negara anggota, rencana strategis dan visi yang terkandung dalam IAEA. Pembangunan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan aspek-aspek berikut. :

1. Peran IAEA sebagai organisasi internasional yang mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan untuk tujuan damai dan tidak dibeolkkkan kearah pengembangan senjata nuklir.
2. *Treaty on The Non-Profleration of Nuclear Weapons* (NPT), merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip utama, yaitu : nonproliferasi, pelucutan dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
3. *Safeguards* adalah sebuah sistem yang berisi pengaturan lebih luas mengenai tindakan teknis dimana sekretariat IAEA memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dari pengumuman yang dibuat oleh negara yang mengenai materi dan aktivitas nuklir²⁰.

Perjanjian IAEA dengan Korea Utara dimulai pada tahun 1985, dan Korea Utara menandatangani kesepakatan bersama untuk tidak melakukan penyebaran pengembangan nuklir. Perjanjian tersebut dikenal sebagai NPT (*Nuclear Non-proliferation Treaty*). Lalu setelah itu, muncul tuduhan yang dilontarkan Amerika Serikat terhadap Korea Utara bahwa mereka telah mengembangkan dan membangun reaktor nuklir tanpa diketahui oleh pihak IAEA. Kemudian pada tahun 1992 dugaan yang dilontarkan Amerika Serikat mulai teridentifikasi kebenarannya dan Korea Utara sepakat untuk menepati perjanjian NPT tersebut.

Peran IAEA dalam menanggapi krisis nuklir Korea Utara terlihat tidak begitu dominan dan kuat. Hal ini bisa dilihat dengan begitu mudah-

²⁰ Amelia Yuli Pratiwi, “Peran IAEA dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai (dilihat dengan pendekatan Hukum Internasional)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume II, 2 (2013) , hal. 8

nya Korea Utara membatalkan dan mengundurkan diri dari perjanjian NPT. Selain itu, keefektifan NPT sendiri yang dinilai sebagai power rezim oleh IAEA tidak mampu mempengaruhi perilaku Korea Utara yang tetap meneruskan upaya pengembangan senjata nuklirnya. Terlebih lagi, bukti power IAEA yang kurang dapat dilihat dengan adanya upaya Amerika Serikat yang berusaha menyelesaikan permasalahan krisis ini dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Korea Utara memperlihatkan tak adanya daya IAEA untuk bernegosiasi dengan Korea Utara. Gagalnya kesepakatan Jenewa juga menunjukkan bahwa power yang dimiliki oleh IAEA hanya terpaku pada power legitimasi atau power dari kesepakatan bersama, tidak ada sanksi khusus yang dapat diberikan oleh IAEA terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal ini juga ditunjukkan dengan hadirnya perundingan segi-6 untuk membahas krisis ini setelah gagalnya kesepakatan IAEA kedua di Jenewa.

SIMPULAN

Salah satu elemen terpenting dalam dilema keamanan adalah peningkatan kemampuan militer yang biasanya diimplementasikan dalam peningkatan anggaran militer dan keikutsertaan dalam konflik atau masalah internasional yang menonjolkan bidang militernya. Untuk itu Korea Selatan juga berupaya untuk mempertahankan dirinya dari serangan Korea Utara dan mengutamakan kepentingan nasionalnya, di atas kepentingan Negara lain yang berdasarkan prinsip *self help* (pertolongan terhadap diri sendiri). Dimana dalam menjaga dan meningkatkan keamanannya, suatu Negara dapat mengupayakan langkah-langkah yang dapat mengakibatkan berkurangnya keamanan di Negara lain serta dapat mengganggu keamanannya.

Respon-respon yang dilakukan Korea Utara terhadap Korea Selatan, karena adanya rasa saling mencurigai satu sama lain, selain itu karena adanya hasil perundingan yang tidak tercapai bagi kedua negara tersebut. Kebijakan-kebijakan Korea Selatan dalam peningkatan keamanan dan persenjataan tentunya memiliki tujuan untuk melindungi serta untuk menjaga

pertahanan dan keamanan negaranya dari ancaman dan serangan nuklir Korea Utara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari pemikiran *security dilemma* yang mana upaya Korea Selatan dalam meningkatkan persenjataan dan keamanannya merupakan bukti ketakutan Korea Selatan terkait perkembangan nuklir Korea Utara.

Pengembangan nuklir Korea Utara menjadi sebuah ancaman besar bagi Korea Selatan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengimbangi kekuatan Korea. Dengan itu Korea Selatan mengambil langkah untuk memperkuat pertahanan keamanan dengan melakukan kerjasama di bidang militer terutama dengan Amerika Serikat dan Jepang. Bagi Korea Selatan dengan memperkuat sistem pertahanannya hal ini dapat mengimbangi kekuatan senjata nuklir Korea Utara apabila suatu waktu terjadi perang antara keduanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia Yuli Pratiwi, “*Peran IAEA dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai (Dilihat dengan Pendekatan Hukum Internasional)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume II, 2 (2013)
- Carter, Aidan Foster, *North Korea: Questions and Solutions in 2013*, dalam Strategic Review January-March 2013 Volume 3 Number 1.
- Cha & Kang, *Nuclear North Korea: a Debate on Engagement Strategies*, New York: Columbia University Press, 2003,
- Charles A Mc Clelland, 1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: CV. Rajawali,
- Creswell. J.W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication. Inc.
- Dahlan Nasution, 1989. *Politik Internasional: Konsep dan Teori*. Jakarta: Erlangga.
- Galtung. J. 2003. *Theories of conflict (Definitions, Dimensions, Negotiations, Formations)*. Routledge.

- H.J.Morgenthau. 2010. *Politics Among Nations: The struggle for power and peace*, 6th edition. B. Indonesia Politik Antar Bangsa diterjemahkan oleh S. Maimoen. A.M. Fatwan dan Cecep Sudrajat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta.
- Jessica Kuhn, "Global Security Issues in North Korea," *Multilateralism in Northeast Asia*, (Task Force, 2010).
- Joseph S. Bermudez, Jr., "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK," Occasional Paper No. 2, (Center for Nonproliferation Studies, 1999).
- Mas' oed, M. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia
- Michael G. Schechter, "Historical Dictionary of Internasional Organizations". (Maryland: Scarecrow Press)
- O. Kanji, 2003. *Security, Conflict Research Consortium*. University of Colorado, Colorado
- Perwira, Anak Agung dan Yayan M. Yani., 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Riri Dwianto, 2000. "Kerjasama Keamanan Asia Timur" dalam *Agenda dan Penataan Kemanan di Asia Pasifik*, Batarto Bandoro (Penyunting), CSIS, Jakarta
- Rizal Sukma, 1992-1993. "Dua Korea dan Prospek Perdamaian di Asia Timur", dalam *Analisa CSIS*, Jakarta.
- Seung-Yoon Yang dan Mochtar Mas' oed, 2005. *Masyarakat, Politik dan Pemerintahan Korea : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Seung-Yoon Yang dan Mochtar Mas' oed, 2002. *Politik Luar Negeri Korea Selatan : Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Seung – Yoon, Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea, Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2003,
- Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, "The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects," *Korea Observer*, Vol. 39, No.4, (The Institute of Korean Studies, winter 2008).
- Victor D. Cha," *Politics Democracy Under Kim Young Sam Government, Something Old, Something New*," dalam *Asian Survey*, Vol XXX111, no 9 hal 854
- William J. Perry, "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," *Annals of the American Academy of Political Science*, Vol. 607 (Sage Publications, Inc. 2006).
- W.T. Tow. 2001 *Asia-Pasific Strategic Relations: Seeking Convergent Security*, Cambridge University Press, New York.